

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INVESTASI PEMERINTAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALEMBANG

Oleh:
Hari Apriansyah
Fachrizal Bachri

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze the causality relationship between government investment and economic growth in Palembang during the city period of 1994-2005. The data used in this study are secondary data. To analyse the data, Granger Causality Test which was formulated in a simple regression equation used. The research result shows that two directions causality relationship between government investment and economic growth during that period. It can be seen from the coefficients result of two regressions which are not zero ($b_j \neq 0$ and $d_j \neq 0$) and the F statistic tests are bigger than the F table ($20,799 > 6,26$ and $10,788 > 6,26$).

Keywords : Government investment, Economic growth, Granger Causality.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan ekonomi tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Menurut Dumairy (1999: 158), dalam perekonomian modern peranan pemerintah dapat dipilah menjadi 4 macam kelompok peran yaitu:

1. Peran *alokatif*, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran *distributif*, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran *stabilisatif*, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*.
4. Peran *dinamisatif*, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Pemerintah sebagai suatu organisasi atau rumah tangga melakukan berbagai aspek pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan secara rutin. Akan tetapi, juga untuk membiayai kegiatan yang lebih luas seperti pembangunan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang mutlak dan diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi tersebut dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam proses kegiatan ekonomi dan merupakan indikasi untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2000: 10).

Investasi merupakan mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang, di mana tujuan utamanya adalah mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada (Yasin, 2003: 7).

Selain itu investasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pembiayaan pembangunan yang merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang produktif tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan dengan posisi semacam ini maka hakikatnya investasi juga merupakan langkah awal dari kegiatan pembangunan ekonomi (Dumairy, 1999: 132).

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa di tabung sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan tersebut adalah pada pembuatan proyeksi atau perkiraan kebutuhan investasi tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi investasi harus memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel investasi harus dijadikan salah satu faktor penentu.

Dalam usaha meningkatkan investasi, pemerintah melalui kebijakannya memberikan kesempatan pada pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijaksanaan yang dibuat tersebut antara lain UU No.1 tahun 1967 tentang kebijaksanaan Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.6 tahun 1968 tentang kebijaksanaan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selain itu, guna mempermudah proses penanaman modal di

Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan memberlakukan Daftar Negatif Investasi (DNI) berdasarkan Keppres No.21 tahun 1989.

Namun seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, kemampuan para investor swasta untuk menanamkan modalnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada suku bunga kredit investasi sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Selain itu belum stabilnya kondisi keamanan, sosial, dan politik di Indonesia membuat semakin menurunnya minat pihak swasta berinvestasi. Fenomena ini membuat pemerintah kembali turun tangan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembiayaan pada pembangunan sektor-sektor perekonomian.

Kota Palembang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai kota pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, dan pariwisata. Perkembangan Kota Palembang yang pesat dapat terjadi jika ada investasi yang signifikan. Masuknya investasi memungkinkan terjadinya peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi antara lain industri, perdagangan, pertanian, tenaga kerja, dan sektor lainnya.

Dalam pembangunan suatu daerah, dana diperoleh dari APBN dan APBD. Kontribusi APBD lebih rendah dibandingkan APBN, diharapkan di masa datang APBD akan menjadi sumber yang dominan bagi pembangunan daerah Palembang. Realisasi penerimaan APBD Kota Palembang tahun 2005 mencapai sebesar Rp.698.327.409.738,- atau naik sebesar 16,33 persen bila dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp.600.278.292.190,-. Realisasi penerimaan APBD tahun 2005 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan penerimaan lainnya yang terdiri dari atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Besarnya penerimaan PAD sebesar Rp.78.714.175.203,-, atau sebesar 10,26 persen. Bagian terbesar dari realisasi penerimaan APBD berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.351.714.000.000,- atau sebesar 57,20 persen.

Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan setiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan dan kebutuhan. Semenjak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2000, maka terjadi perubahan penyusunan dan istilah dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Penggunaan istilah tahun anggaran (April-Maret) diganti dengan istilah tahun kalender (Januari-Desember). Peningkatan pengeluaran pemerintah Kota Palembang tertinggi terjadi pada tahun 2005, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menambah alokasi pengeluaran pemerintah. Realisasi pengeluaran APBD Kota Palembang tahun anggaran 2005 yang berdasarkan kinerja sebesar Rp. 665.099.084.906,- terdiri dari pengeluaran untuk aparatur daerah sebesar Rp.428.372.954.379,- pengeluaran untuk pelayanan publik sebesar Rp.212.784.503.987,- dan pengeluaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka masing-masing sebesar Rp.9.691.069.920,- dan Rp.4.250.556.621,-. Pengeluaran APBD Kota Palembang tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen atau sebesar Rp. 58.632.822.058,- dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang selama kurun waktu 1994-2005 dengan migas rata-rata per tahun adalah sebesar 4,79 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada

tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -11,43 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang terjadi pada perekonomian Indonesia yang juga berdampak pada perekonomian Kota Palembang. Namun pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang kembali mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang ingin dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana korelasi atau hubungan antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang, dan bagaimana arah kausalitas investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang dan untuk melihat arah kausalitas investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan daerah dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan mengkaji pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Daerah

Perencanaan bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan menentukan peran yang akan dilakukannya di dalam proses pembangunan tersebut. Ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 1999: 120) yaitu :

a. *Enterprenuer*

Dengan perannya sebagai *enterprenuer*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana dan strateginya. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat).

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan ekonomi melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

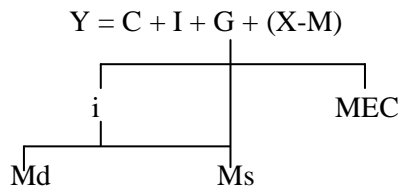
d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain pembangunan kawasan industri, membantu industri-industri kecil, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat.

Teori Investasi

Menurut Sukirno (2000: 109) investasi yang diinginkan adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan nasional atau pertumbuhan permintaan efektif. Dengan demikian besarnya investasi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah GNP atau GDP di tingkat nasional, dan PDRB pada tingkat daerah.

Secara teoritis dikatakan dalam bentuk hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan dengan pendekatan Keynes untuk mengasumsikan adanya peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu dengan persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$ untuk perekonomian terbuka. Keynes dalam bukunya "*The General Theory*" berpendapat bahwa investasi ditentukan oleh dua faktor yaitu *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) dan tingkat bunga. Seseorang akan melakukan investasi apabila usaha yang dilakukan tampak menguntungkan dan dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan serta biaya modal untuk membiayai investasi (Nopirin, 1992:137). Dapat diartikan bahwa keputusan untuk melakukan investasi tergantung pada besarnya pengembalian modal yang disebut MEI (*Marginal Efficiency of Investment*) yang dapat dijelaskan dengan skema berikut :



Gambar 1.
Skema Marginal Efficiency of Capital

- Dimana :
- Y = Pendapatan Nasional
 - C = Pengeluaran Konsumsi RT
 - I = Investasi
 - G = Pengeluaran Pemerintah
 - (X-M) = Perdagangan Luar Negeri
 - i = Tingkat Bunga
 - MEC = Marginal Efficiency of Capital
 - Md dan Ms = Penawaran uang dan Permintaan uang

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa selain *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) maka tingkat bunga adalah variabel yang secara langsung mempengaruhi tingkat

investasi. Sementara itu tingkat bunga dipengaruhi oleh penawaran uang dan permintaan uang.

Konsep PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan sejumlah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi sering digunakan karena relatif lebih mudah, meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran dalam menilai prestasi ekonomi suatu daerah. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan keuangan dari suatu perekonomian dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Dengan perkataan lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto atau data Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999: 7).

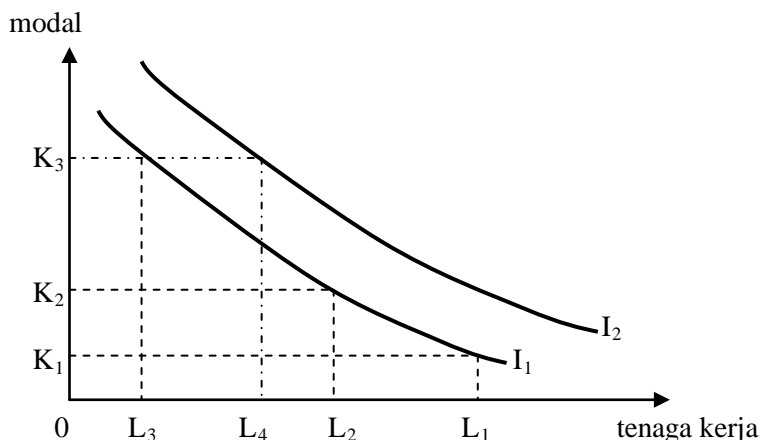
Selain itu, Simon Kuznets dalam Jhingan (2000: 57), dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Solow-Swan)

Teori yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Travor Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk atau produktivitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi (Sukirno, 2000: 436).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik dapat dijelaskan pada gambar 2. Fungsi produksi yang ditunjukkan oleh I_1 dan I_2 yang berbentuk sedemikian rupa, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain K_3 dan L_3 , K_2 dan L_2 , serta K_1 dan L_1 .

Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Di samping itu, jumlah output dapat mengalami perubahan meskipun jumlah modal tetap, misalnya jumlah modal tetap sebesar K_3 , jumlah output dapat diperbesar menjadi I_2 , jika tenaga kerja yang digunakan ditambah dari L_3 menjadi L'_3 .



Gambar 2.
Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan yang di kemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Untuk menciptakan pertumbuhan yang mantap maka investasi harus senantiasa ditingkatkan, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Jhingan, 2000: 230). Tingkat pertumbuhan PDRB ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal atau output nasional. Lebih khusus lagi dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan regional akan secara langsung atau secara positif berhubungan erat dengan rasio tabungan.

Secara sederhana, teori Harrod-Domar dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\Delta Y/Y = s/k$$

Di mana : $\Delta Y/Y$ adalah tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP.
 s adalah rasio tabungan nasional; dan
 k adalah rasio modal/ output nasional

Dari persamaan dinyatakan bahwa agar bisa tumbuh, maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebagian dari GNPnya. Lebih banyak yang dapat di tabung dan kemudian ditanamkan, maka akan lebih cepat lagi perekonomian itu tumbuhnya. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi tergantung kepada produktivitas investasi tersebut. Produktivitas investasi adalah banyaknya tambahan output yang didapat dari suatu unit investasi dapat diukur dengan “inverse” rasio kapital/output, k , karena *inverse* ini, $1/k$, adalah rasio

output/kapital atau output/investasi. Kemudian, dengan mengalikan tingkat *inverse* baru $s = I/Y$, dengan produktivitasnya, $1/k$, maka akan didapat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau GNP yang meningkat. Sehingga dengan kata lain investasi merupakan salah satu modal pembangunan dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave (Dumairy, 1999: 163) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Di mana pada awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri, salah satunya kasus eksternalitas negatif yang menuntut pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasinya.

Adolph Wagner (Basri, 2003: 54) mengemukakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*Law of Ever Increasing State Activity*), apabila pendapatan per kapita juga meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{G_p C_t}{Y_p C_t} > \frac{G_p C_{t-1}}{Y_p C_{t-1}} > \frac{G_p C_{t-2}}{Y_p C_{t-2}} > \dots > \frac{G_p C_{t-n}}{Y_p C_{t-n}}$$

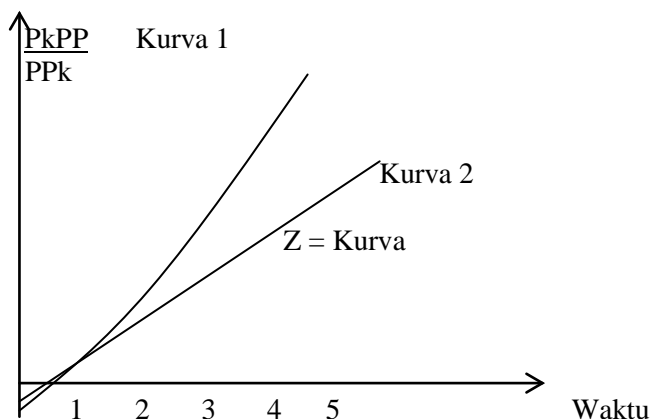
Di mana : $G_p C$ = pengeluaran pemerintah per kapita

$Y_p C$ = produk/ pendapatan nasional per kapita

t = indeks waktu

Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (G/Y) ditunjukkan melalui kurva eksponensial (Gambar 2.3). Wagner mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional dan mendasarkan pandangannya pada teori organis mengenai pemerintah (*Organic Theory of The State*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan inefisiensi birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan (Dumairy, 1999: 162).



Gambar 2.3
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat mengenai perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkan pada suatu dialektika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarifnya mungkin tidak berubah. Dengan kata lain, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Wagner dalam Muslim, 2003: 14).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang didapat dari instansi pemerintah antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Palembang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumsel, serta bahan bacaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif dengan data *time series*. Teknik analisis kualitatif yang dipakai berpegang pada teori-teori yang dipakai dan dengan menguraikan sifat atau karakter dari keadaan yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, sedangkan teknik analisis

kuantitatif menggunakan persamaan model regresi linier sederhana dan Uji Kausalitas Model Granger.

Dalam menganalisis pengaruh investasi pemerintah (Ip) terhadap pertumbuhan ekonomi (Eg) Kota Palembang periode 1994-2005 dibuatlah fungsi matematis dari variabel yang akan diteliti, yaitu :

$$\mathbf{Eg = f (Ip)}$$

Dari persamaan fungsi di atas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{Eg = \alpha + \beta(Ip) + \varepsilon} \dots\dots\dots (1)$$

- Di mana :
- Eg = pertumbuhan ekonomi
 - Ip = investasi pemerintah
 - α = konstanta
 - β = parameter
 - ε = error term

Sedangkan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi (Eg) terhadap investasi pemerintah (Ip) Kota Palembang periode 1994-2005 dibuatlah fungsi matematisnya, yaitu :

$$\mathbf{Ip = f (Eg)}$$

Dari persamaan fungsi di atas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{Ip = \alpha + \beta(Eg) + \varepsilon} \dots\dots\dots (2)$$

- Di mana :
- Eg = pertumbuhan ekonomi
 - Ip = investasi pemerintah
 - α = konstanta
 - β = parameter
 - ε = error term

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan kausalitas antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, maka penulis menggunakan *Uji Kausalitas Granger*. Konsep Kausalitas Model Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep *prediktibilitas*, di mana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang. Akan tetapi masa kini atau masa datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Dumairy, 1987: 4 dalam Hermawati, 2004: 29).

Dengan menggunakan pengujian model Granger untuk mengetahui hubungan antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, maka dapat dirumuskan :

$$Ip = a_0 + \sum_{j=1}^m a_j Ip_{t-j} + \sum_{j=1}^m b_j Eg_{t-j} + U_t$$

$$Eg = c_0 + \sum_{j=1}^m c_j Eg_{t-j} + \sum_{j=1}^m d_j Ip_{t-j} + V_t$$

Di mana : I_p = investasi pemerintah
 E_g = pertumbuhan ekonomi
 t = waktu
 U_t, V_t = error term (kesalahan pengganggu)
 $t-j$ = operasi kelambanan (lag/ masa lalu)

Dari dua persamaan di atas menunjukkan bahwa dua variabel yang akan diamati yakni pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah, saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil regresi kedua variabel model linier akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing (Gujarati, 2003: 697 dalam Haryanto, 2004: 30) yaitu :

1. Jika $\sum b_j \neq 0$ dan $\sum d_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X.
2. Jika $\sum b_j = 0$ dan $\sum d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y.
3. Jika $\sum b_j = 0$ dan $\sum d_j = 0$, maka X ke Y bebas antara satu dengan yang lain.
4. Jika $\sum b_j \neq 0$ dan $\sum d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y ke X.

Untuk memperkuat indikasi keberadaan bentuk kausalitas tersebut, maka dilakukan *F-test* untuk masing-masing model regresi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang

Salah satu indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan tahun tertentu pada tahun dasar, di mana untuk perhitungan ini menggunakan tahun dasar 2000, sedangkan PDRB atas harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Penyajian PDRB untuk tahun 1994-2005 menggunakan tahun dasar 2000. Hal ini dikarenakan dalam jangka waktu tujuh tahun telah terjadi perubahan struktur atau bentuk komoditas serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Kemudian, perkembangan perekonomian dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai globalisasi tentunya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Selain itu juga adanya krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997 berdampak pada perubahan struktur perekonomian. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah berbeda dengan tahun 1993, sehingga perubahan tahun dasar dari tahun 1993 ke tahun 2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi PDRB akan menjadi realistis atau dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pergeseran ekonomi yang terjadi.

Perkembangan perekonomian Kota Palembang pada tahun 2000-2005 telah mengalami pemulihan setelah dilanda gejolak ekonomi pada tahun 1998, perekonomian selalu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan signifikan menunjukkan peningkatan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang
Periode 1994-2005 (Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1994	2.791.475	2.509.127	7.199.527	6.634.512
1995	3.344.913	3.011.539	7.887.802	7.323.838
1996	3.980.787	3.576.032	8.553.533	7.981.519
1997	4.670.319	4.238.830	9.016.279	8.497.125
1998	6.809.872	6.189.483	7.985.718	7.434.135
1999	7.887.783	7.115.974	9.513.386	7.741.908
2000	9.930.072	8.041.520	9.930.072	8.041.520
2001	12.329.627	9.362.479	10.330.116	8.376.760
2002	14.460.830	10.669.707	10.895.982	8.919.772
2003 ^{r)}	16.815.478	12.425.650	11.488.473	9.506.699
2004*	19.287.616	14.508.625	12.226.259	10.263.312
2005**	24.595.162	17.278.525	13.088.880	11.152.237

Sumber : BPS Kota Palembang, berbagai edisi, data diolah

Ket : r) angka revisi, *) angka sementara, **) angka sangat sementara, e = Error term

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan PDRB Kota Palembang dalam 12 tahun terakhir yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 1998 di mana perekonomian nasional kurang menguntungkan dampak dari krisis moneter dan kondisi politik serta keamanan yang tidak terkendali sehingga perekonomian Kota Palembang ikut terpengaruh.

Keadaan ini berangsur-angsur membaik pada tahun-tahun berikutnya, hal ini terlihat dari perkembangan PDRB pada tahun 2001 atas harga konstan dengan migas yang meningkat sebesar 4,03 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas harga konstan tanpa migas meningkat sebesar 4,16 persen. Pada tahun 2005, PDRB Kota Palembang atas harga konstan dengan migas meningkat sebesar 7,06 persen dan tanpa migas meningkat sebesar 8,66 persen dibandingkan tahun 2004.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang

Tolak ukur dalam menilai gambaran dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi ialah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung merupakan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Khususnya bagi suatu daerah, indikator ini merupakan pedoman

untuk mengetahui dan menilai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tahun 1994 dan 1995 meningkat 9,56 persen diikuti tahun-tahun berikutnya yaitu 1996 dan 1997 yang mengalami penurunan yakni 8,44 dan 5,41 persen. Puncaknya pada tahun 1998 di mana krisis ekonomi melanda Indonesia termasuk Kota Palembang, pertumbuhan ekonomi mencapai titik negatif sebesar 11,43 persen. Setelah krisis mulai mereda, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang perlahan-lahan merangkak naik dengan persentase pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 6,42 persen dan 7,06 persen.

Apabila dilihat dari masing-masing sektor PDRB menurut lapangan usaha, maka pertumbuhan ekonomi Kota Palembang relatif bervariasi. Berdasarkan laju pertumbuhan menurut lapangan usaha dengan harga konstan, pertumbuhan tertinggi dialami sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,63 persen di tahun 2005 dan terendah dialami oleh sektor pertanian sebesar 2,51 persen. Bila dilihat secara rata-rata selama periode 1994-2005 pertumbuhan tertinggi justru dialami oleh sektor listrik, gas, dan air minum sebesar 8,63 persen, hal ini menunjukkan pentingnya sektor tersebut dalam kehidupan masyarakat banyak dalam mendukung infrastruktur ekonomi pada proses industrialisasi yang mulai tumbuh di Kota Palembang.

Pengaruh Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam melihat pengaruh antara investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang periode 1994-2005 dengan menggunakan fungsi matematis model regresi linier sederhana, maka didapat persamaan sebagai berikut :

$$Eg = \alpha + \beta(Ip) + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Di mana :
Eg = pertumbuhan ekonomi
Ip = investasi pemerintah
 α = konstanta
 β = parameter

Berdasarkan model persamaan di atas, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$Eg = 7890100,530 + 2,406 Ip$$

(334200,459) (3,168) standar error
(7,594) t statistik
(2,228) t tabel

$R^2 = 0,852$
F statistik = 57,668
F tabel = 4,96

Dari persamaan model regresi linier sederhana di atas, dapat diketahui bahwa nilai F statistik yang diperoleh yaitu sebesar 57,668 dan nilai F tabel sebesar 4,96, atau dengan kata lain F statistik lebih besar dari F tabel ($57,668 > 4,96$). Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Palembang periode 1994-2005.

Besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dapat dilihat dari koefisien determinasi atau R squared (R^2). Dari hasil regresi diperoleh R^2 sebesar 0,852, ini berarti 85,2 persen pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dipengaruhi oleh investasi pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 14,8 persen dipengaruhi variabel lain di luar model.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan uji t, diperoleh nilai t statistik sebesar 7,593 dan nilai t tabel sebesar 2,228 atau dengan kata lain t statistik lebih besar dari t tabel ($7,593 > 2,228$), hal ini mengindikasikan bahwa investasi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Pemerintah

Dalam melihat pengaruh antara investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang periode 1994-2005 dengan menggunakan fungsi matematis model regresi linier sederhana, maka didapat persamaan sebagai berikut :

$$I_p = \alpha + \beta(Eg) + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

- Di mana :
- Eg = pertumbuhan ekonomi
 - I_p = investasi pemerintah
 - α = konstanta
 - β = parameter
 - ε = error term

Berdasarkan model persamaan di atas, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$I_p = -26746200,874 + 35418,607 Eg$$

(4663299,44) (4664,060) standar error
(7,594) t statistik
(2,228) t tabel

$R^2 = 0,852$
 F statistik = 57,668
 F tabel = 4,96

Dari persamaan model regresi linier sederhana di atas, dapat diketahui bahwa nilai F statistik yang diperoleh yaitu sebesar 57,668 dan nilai F tabel sebesar 4,96, atau dengan kata lain F statistik lebih besar dari F tabel ($57,668 > 4,96$). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi investasi pemerintah Kota Palembang periode 1994-2005.

Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi pemerintah Kota Palembang dapat dilihat dari koefisien determinasi atau R squared (R^2). Dari hasil regresi diperoleh R^2 sebesar 0,852, ini berarti 85,2 persen perkembangan investasi pemerintah Kota Palembang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 14,8 persen dipengaruhi variabel lain di luar model.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan uji t, diperoleh nilai t statistik sebesar 7,593 dan nilai t tabel sebesar 2,228 atau dengan kata lain t statistik lebih besar

dari t tabel ($7,593 > 2,228$), hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap investasi pemerintah Kota Palembang

Dari hasil analisis menggunakan model regresi linier di atas dapat diketahui bahwa baik investasi pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi Kota Palembang periode 1994-2005 secara signifikan sama-sama saling mempengaruhi.

Analisis Uji Kausalitas Hubungan antara Investasi Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memperkuat hubungan antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dilakukan penelitian untuk membuktikan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu apakah hubungan antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai bentuk hubungan kausalitas satu arah atau mempunyai hubungan kausalitas dua arah atau tidak mempunyai hubungan sama sekali. Hubungan kausalitas satu arah berarti antara kedua variabel hanya investasi pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau hanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi investasi pemerintah. Sedangkan hubungan kausalitas dua arah berarti antara kedua variabel yaitu investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi atau memiliki hubungan timbal balik.

Analisis yang digunakan untuk melihat hubungan yang terjadi antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang adalah dengan menggunakan uji kausalitas Granger. Di dalam pengujian kausalitas Granger ini, pada saat investasi pemerintah menjadi variabel dependen, maka yang menjadi variabel independen adalah variabel lag investasi pemerintah dan variabel lag pertumbuhan ekonomi. Demikian juga ketika pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen, maka yang menjadi variabel independennya adalah lag investasi pemerintah dan variabel lag pertumbuhan ekonomi.

Model persamaan uji kausalitas Granger merupakan distribusi lag. Adanya lag menandakan bahwa variabel yang dipengaruhi membutuhkan waktu untuk bereaksi terhadap variabel yang mempengaruhinya. Untuk menentukan berapa jumlah lag yang sesuai untuk model yang diamati digunakan rumus LR statistik, terlebih dahulu dilakukan *the likelihood ratio test* terhadap semua jumlah lag yang mungkin sesuai untuk model yang diamati. Namun demikian, setelah dilakukan perhitungan dengan program Eviews, hanya *lag range* hingga 3 yang memungkinkan untuk dipakai dalam model.

Tabel 2. Rekapitulasi nilai Log Likelihood dan LR dalam model Kausalitas antara Investasi Pemerintah (Ip) dan Pertumbuhan Ekonomi (Eg)

<i>Panjang Lag</i>	<i>Log Likelihood</i>	<i>LR Statistik -2 (Ln-L)</i>
1	-572,8596	-109,45
2	-518,1325	-122,48
3	-456,8930	-

Sumber : Hasil penelitian

Hasil LR statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai LR statistik yang terendah berada pada lag ke 2 sebesar -122,48. Ini berarti jumlah lag yang digunakan dalam model sebanyak 2 (dua) lag.

Investasi Pemerintah sebagai Variabel Dependen

Untuk analisis uji kausalitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi pemerintah diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$Ip_t = a_1 Ip_{t-1} + a_2 Ip_{t-2} + b_1 Eg_{t-1} + b_2 Eg_{t-2} + U_t$$

$$Ip_{1994-2005} = 0,0704 Ip_{t-1} + 0,4379 Ip_{t-2} + 18413,1196 Eg_{t-1} + 14969,4114 Eg_{t-2} + U_t$$

Dalam model regresi yang pertama, di mana investasi pemerintah digunakan sebagai variabel dependen, maka hanya akan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi pemerintah, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Regresi Investasi Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t statistik</i>	<i>Signifikan</i>
<i>C</i>	-2575164	11635301	-2,213	0,078
<i>Eg_{t-1}</i>	18413,120	14698,428	6,253	0,266
<i>Eg_{t-2}</i>	14969,411	14091,742	1,062	0,337

$$R^2 = 0,943$$

$$F \text{ statistik} = 20,799$$

$$F \text{ tabel} = 6,26$$

$$t \text{ tabel} = 2,447$$

Model ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R^2 ialah sebesar 0,943 artinya perubahan yang terjadi pada investasi pemerintah 94,3 persen dapat dijelaskan (dipengaruhi) oleh pertumbuhan ekonomi dan sisanya sebesar 5,7 persen dipengaruhi faktor lainnya.

Dari hasil regresi dengan uji kausalitas Granger diketahui bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi dari $Eg_{t-1} = 18413,120$ dan $Eg_{t-2} = 14969,411$ tidak sama dengan nol atau dengan kata lain b_j tidak sama dengan nol ($b_j \neq 0$).

Selain itu, hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 20,799, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai F tabel sebesar 6,26. Dilihat dari nilai F statistik yang lebih besar dari F tabel ($20,799 > 6,26$), maka dari keseluruhan model, variabel pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada investasi pemerintah.

Bila dilihat dari nilai t statistik yang diperoleh untuk $Eg_{t-1} = 6,253$ dan $Eg_{t-2} = 1,062$, hanya nilai t statistik Eg_{t-1} yang signifikan mempengaruhi investasi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t tabel sebesar 2,447 atau dengan kata lain nilai t statistik lebih besar dari t tabel ($6,253 > 2,447$), sedangkan nilai t statistik untuk Eg_{t-2} lebih kecil dari nilai t tabel sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap investasi pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen

Untuk analisis uji kausalitas yang kedua antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$Eg_t = a_1 Eg_{t-1} + a_2 Eg_{t-2} + b_1 Ip_{t-1} + b_2 Ip_{t-2} + U_t$$

$$Eg_{1994-2005} = 0,3950 Eg_{t-1} + 0,3336 Eg_{t-2} + 6,6081 Ip_{t-1} + 3,3952 Ip_{t-2} + U_t$$

Dalam model regresi yang kedua, di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel dependen, maka hanya akan melihat pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Pemerintah

Variabel	Koefisien	Std. Error	t statistik	Signifikan
C	2665979,2	3555107,8	0,750	0,487
Ip_{t-1}	6,6081	0,000	0,619	0,563
Ip_{t-2}	3,3952	0,000	0,329	0,755

$$R^2 = 0,896$$

$$F \text{ statistik} = 10,788$$

$$F \text{ tabel} = 6,26$$

$$t \text{ tabel} = 2,447$$

Dari hasil regresi dengan uji kausalitas Granger diketahui bahwa nilai koefisien investasi pemerintah dari $Ip_{t-1} = 6,6081$ dan $Ip_{t-2} = 3,3952$ tidak sama dengan nol atau dengan kata lain d_j tidak sama dengan nol ($d_j \neq 0$).

Selain itu, hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 10,788, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai F tabel sebesar 6,26. Dilihat dari nilai F statistik yang lebih besar dari F tabel ($10,788 > 6,26$), maka dari keseluruhan model, variabel investasi pemerintah mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi.

Nilai koefisien determinasi atau R^2 ialah sebesar 0,896 artinya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi 89,6 persen disebabkan oleh investasi pemerintah dan sisanya sebesar 10,4 persen dipengaruhi faktor lainnya.

Dilihat dari nilai t statistik yang diperoleh untuk Ip_{t-1} dan Ip_{t-2} masing-masing sebesar 0,619 dan 0,329, sedangkan nilai t tabel sebesar 2,447 atau dengan kata lain nilai t statistik lebih kecil dari t tabel ($0,619 ; 0,329 < 2,447$), sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis uji kausalitas hubungan antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang periode 1994-2005 yang diperoleh dari dua hasil regresi yaitu nilai koefisien b_j dan $d_j \neq 0$ dan nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang periode 1994-2005 memiliki bentuk hubungan kausalitas dua arah. Artinya pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat akan semakin menggalakkan kegiatan perekonomian di segala bidang. Situasi ini tentunya akan melibatkan pemerintah khususnya dalam penyediaan berbagai sarana

dan prasarana yang akan diwujudkan dalam bentuk investasi pemerintah yaitu pengeluaran pembangunan, artinya berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan perekonomian akan semakin banyak dan memadai sehingga perkembangan ekonomi di Kota Palembang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan meningkatkan pula pendapatan daerah dan selanjutnya dengan pendapatan daerah yang besar, maka alokasi untuk pengeluaran pembangunan pun dapat ditingkatkan. Jadi terlihat bahwa antara investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi.

Meskipun antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, perlu diketahui variabel mana yang paling besar pengaruhnya. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai koefisien determinasi atau R^2 dan variabel yang signifikan. Berdasarkan tabel 5.2 dan 5.3 di atas diketahui bahwa R^2 fungsi pertumbuhan ekonomi 0,943 lebih besar dari R^2 fungsi investasi pemerintah 0,896. Bila dilihat dari nilai t statistik yang diperoleh dari kedua regresi, maka nilai t statistik Eg_{t-2} pada regresi fungsi investasi pemerintah serta Ip_{t-1} dan Ip_{t-2} pada regresi fungsi pertumbuhan ekonomi, semuanya lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak mempengaruhi secara signifikan. Sedangkan nilai t statistik Eg_{t-1} pada regresi fungsi pertumbuhan ekonomi lebih besar dari nilai t tabel, jadi signifikan berpengaruh terhadap investasi pemerintah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan walaupun antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas dua arah yaitu saling mempengaruhi, namun pertumbuhan ekonomi lebih besar pengaruhnya terhadap investasi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang selama periode 1994 sampai 2005 secara signifikan memiliki hubungan yang positif saling mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan uji kausalitas dengan menggunakan uji kausalitas Granger diperoleh hasil bahwa selama periode 1994 sampai 2005 antara variabel investasi pemerintah dengan variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang terdapat hubungan kausalitas dua arah atau dengan kata lain investasi pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi pemerintah.

Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat akan semakin menggalakkan kegiatan perekonomian di segala bidang. Keadaan ini tentunya akan melibatkan pemerintah khususnya dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang akan diwujudkan dalam bentuk investasi pemerintah yaitu pengeluaran pembangunan, artinya berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan perekonomian akan semakin banyak dan memadai sehingga perkembangan ekonomi di Kota Palembang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan meningkatkan pula pendapatan

daerah dan selanjutnya dengan pendapatan daerah yang besar, maka alokasi untuk pengeluaran pembangunan pun dapat ditingkatkan.

Saran-Saran

1. Untuk dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang ke arah yang positif, maka alokasi pengeluaran pemerintah daerah harus ditingkatkan. Hal ini tentunya harus didukung dengan pendapatan daerah yang semakin besar. Selain itu juga diperlukan dukungan dari investasi swasta yang berfungsi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Bentuk hubungan kausalitas dua arah antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Palembang dalam penyusunan kebijakan pembangunannya. Apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran investasi pemerintah yang memfokuskan ke sektor-sektor produktif yang cepat menghasilkan dan berdasarkan pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Penulis menyarankan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut, baik dengan menambah data maupun dengan metode analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan pembandingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincoln. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE, 1999
- Badan Pusat Statistik Sumsel. *Palembang dalam Angka*. Berbagai Edisi.
- Badan Pusat Statistik Sumsel. *PDRB Kota Palembang*. Berbagai Edisi.
- Basri, Yuswar Zainul. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- BKPMMD Sumsel. *Buku Penanaman Modal*. Palembang, 1999.
- Dajan, Anto. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Danayanti, Mila Mulya. *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Defisit APBN dengan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1992-2004*. Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2005.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Erlangga, 1999.
- Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : PT Erlangga, 1997.
- Haryanto, Junison. *Analisa Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin*. Kajian Ekonomi Vol. 4 No.1. Universitas Sriwijaya, 2005.
- Hadi, Yonathan S. *Analisis Vector Auto Regression (VAR) terhadap Korelasi Antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984-1999/2000*. Jurnal Keuangan dan Moneter Vol.6 No.2. Jakarta : DEPKEU, 2005.

- Hermawati, Lisa. *Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS Universitas Sriwijaya, 2004.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000.
- Kuncoro, Mudrajad, Ph.D. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : PT Erlangga, 2003.
- Macmud, Sofyan. *Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan*. Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol.1. Palembang : FE Universitas Sriwijaya, 2002.
- Marzuki, Ervan. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS Universitas Sriwijaya, 2004.
- Muslim. *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten OKI*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang: PPS Universitas Sriwijaya, 2003.
- Nachrowi, Nachrowi D dan Hardius Usman. 2006. *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : LPFE- Universitas Indonesia.
- Nopiri. *Ekonomi Moneter II*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada, 1992.
- Pemerintah Kota Palembang. *Laporan Perhitungan APBD Kota Palembang*. Berbagai Edisi.
- Suherli, Mardian. *Kajian Pengaruh Perkembangan Suku Bunga terhadap Investasi PMDN di Sumatera Selatan*. Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2000.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000.
- Wadud. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS Universitas Sriwijaya, 2003.
- Yasin, Makmun dan Akhmad. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertanian*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.7. Jakarta : DEPKEU, 2003.